



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG



TAHAP KABUPATEN PEMALANG LINGKUNGAN HIDUP

Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Pemalang 2025

Gambaran visual efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang tahun 2025, membandingkan sampah yang dikelola dengan yang belum tertangani dari total timbulan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pemalang, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJ Mulyati, S.K.M
NIP. 49700131 199303 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Capaian sasaran strategis 1 ”(Meningkatnya Indeks Kualitas Udara)”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Kualitas Udara”.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 84,92 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 75,11. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 88,45 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 103,69% terjadi penurunan sebesar 15,24 %.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya;
2. Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun;
3. Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan baik sektor industri, jasa, kesehatan dan perdagangan serta kegiatan lainnya di Kabupaten Pemalang yang menghasilkan emisi udara;
4. Berkurangnya tutupan vegetasi sebagai penyerap karbondioksida.

b. Capaian sasaran strategis 2 ”(Meningkatnya Indeks Kualitas Air)”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Kualitas Air”.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 75,85 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 75,14. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 99,06%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 101,55% terjadi penurunan sebesar 2,49%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya;
 2. Tekanan pencemaran air yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembuangan air limbah domestik ke badan air/sungai.
 3. Peningkatan jumlah kegiatan usaha baik sektor industri, jasa, Kesehatan dan perdagangan serta kegiatan lainnya di Kabupaten Pemalang yang akan menambah jumlah beban pencemar yang masuk ke badan air/Sungai.
- c. Capaian sasaran strategis 3 "(Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup)":
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan", "Persentase Kegiatan Usaha/Kegiatan yang Diawasi dan Dibina" serta "Penyelesaian Kasus Lingkungan".
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 66,67% terjadi peningkatan sebesar 33,33%.
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Kegiatan Usaha/Kegiatan yang Diawasi dan Dibina tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
 - Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100%
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Penyelesaian Kasus Lingkungan tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
 - Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan personal, dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan kegiatan dan/atau usaha. Jumlah Pengawas lingkungan Hidup tidak sebanding dengan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang harus diawasi di Kabupaten Pemalang;
 2. Rendahnya komitmen pelaku kegiatan dan/atau usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- d. Capaian sasaran strategis 4 "(Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan)":
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Masyarakat yang Aktif Mengelola Lingkungan".
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
 - Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/Lembaga dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. Masyarakat masih menganggap bahwa urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab pemerintah.
- e. Capaian sasaran strategis 5 "(Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi)":
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik", dan "Persentase Penanganan Lahan Kritis".
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2025 sebesar 43,092%,

sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 43,089%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 99,99%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 99,96% terjadi peningkatan sebesar 0,03%.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Penanganan Lahan Kritis tahun 2025 sebesar 0,00763%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 0,067%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 87,81%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 0,23% terjadi penurunan sebesar 87,58%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun;
2. Kontur tanah Kabupaten Pemalang yang berada di daerah Selatan dengan kemiringan lebih dari 15% berpotensi menjadi lahan kritis karena rawan longsor.

f. Capaian sasaran strategis 6 "(Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkatkan)":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Penanganan Sampah", dan "Persentase Pengurangan Sampah".
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Penanganan Sampah tahun 2025 sebesar 70%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 60,82%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 86,89%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 71,12% terjadi peningkatan sebesar 15,77%.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Pengurangan Sampah tahun 2025 sebesar 30%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 25%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 83,33%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 96,18% terjadi penurunan sebesar 6,31%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya timbulan sampah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan SDM pengelola sampah;
3. Tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Pemalang ditutup;
4. Minimnya inovasi pengelolaan sampah;
5. Masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga dalam pengelolaan sampah;
6. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah mutlak menjadi tugas pemerintah.

g. Capaian sasaran strategis 7 ”(Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan)”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh”, dan “Nilai SAKIP”.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sebesar 80,84 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 80,99 Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100,19%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 99,76% terjadi peningkatan sebesar 0,43%.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 64,01 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 69,19 Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 108,09%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,69% terjadi peningkatan sebesar 7,40%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Belum adanya petugas khusus penanganan informasi dan konsultasi di Dinas Lingkungan Hidup sehingga pelayanan masih kurang optimal;
2. Waktu pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Penjelasan Umum Organisasi 2

 1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

 1.2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 5

 1.2.3 Anggaran 6

 1.3 Dasar Hukum 6

 1.4 Sistematika Laporan Kinerja..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Dinas
 Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang 10

 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 14

 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 29

 3.1 Capaian Kinerja..... 29

 3.1.1 Skala Capaian Kinerja 30

 3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun
 Pelaporan 30

 3.1.3 Membandingkan anantara Realisasi Kinerja serta Capaian
 Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa
 Tahun Terakhir 40

 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun
 ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam
 Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 45

 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
 nasional 47

 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
 peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi
 yang telah dilakukan 49

 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... 55

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....58

3.2 Realisasi Anggaran64

BAB IV PENUTUP70

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN Dinas Lingkungan Hidup5

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025..... 6

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 9

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang Tahun Daerah Tahun 2025 11

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang 14

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang Tahun 2025 16

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025..... 17

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 202527

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja30

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 202530

Tabel 3.3 Perhitungan IKU Kabupaten Pemalang Tahun 202532

Tabel 3.4 Hasil Analisis Indeks Pencemaran Kualitas Air Kabupaten
Pemalang Tahun 202533

Tabel 3.5 Pembobotan Akhir Indeks Kualitas Air34

Tabel 3.6 Hasil Penilaian Komponen Evaluasi AKIP Tahun 202539

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja40

Tabel 3.8 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis45

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/provinsi/
Kabupaten/Kota47

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi50

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta
Efisiensi55

Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .58

Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang terdiri dari :

- a) Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- b) Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten;
- c) Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten;
- d) Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten;
- e) Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu 1 penyimpanan sementara limbah B3, 2 pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;

- f) Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- g) Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu:
 - 1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
 - 2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
- h) Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah;
- i) Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah;
- j) Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap :
 - 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
- k) Sub Urusan Persampahan yaitu :
 - 1. Pengelolaan sampah;
 - 2. Penerbitan Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya mempunyai fungsi:

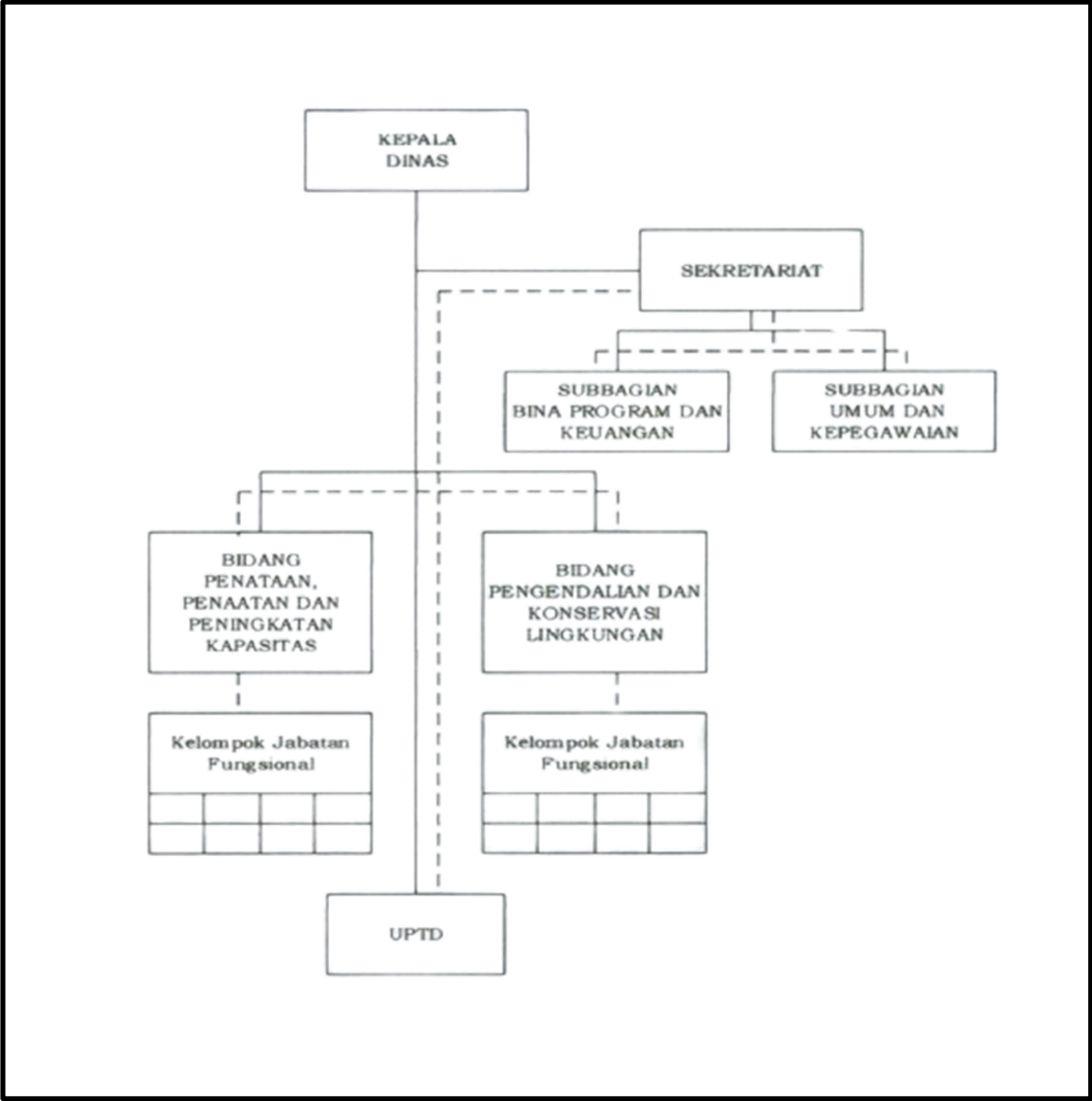
- 1. Perumusan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;

- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Sumber : Perbup Kab. Pemalang No.41 Tahun 2023



1.2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebanyak 355 orang terdiri dari PNS 151 orang, PPPK 3 orang dan Non ASN 204 orang.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezeting
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	1
2	Sekretaris	12	0
3	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	9	1
4	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	6	1
5	Pengolah Data dan Informasi	6	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	5	1
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1
9	Pengadministrasi Perkantoran	IV	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0
11	Pengolah Data dan Informasi	6	1
12	Operator Layanan Operasional 3	3	2
13	Pengelola Umum Operasional	III	1
14	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	11	1
15	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Muda	10	2
16	Pengadministrasi Perkantoran	5	0
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1
18	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Muda	10	1
19	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama/Pertama	8	0
20	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0
21	Pengolah Data dan Informasi	6	1
22	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	8	5
23	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	11	1
24	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda/Muda	9	0
25	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0
26	Pengolah Data dan Informasi	6	0
27	Pengadministrasi Perkantoran	5	0
28	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	8	1
29	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0
30	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Muda	10	0
31	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama/Pertama	8	5
32	Penata Layanan Operasional	IX	1

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezeting
33	Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan	9	0
34	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1
35	Operator Alat Berat	5	3
36	Operator Layanan Operasional 5	5	1
37	Pengadministrasi Perkantoran	5	6
38	Operator Layanan Operasional 3	3	28
39	Operator Layanan Operasional 1	1	80
40	Kepala Laboratorium Lingkungan	9	1
41	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1
42	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama/Pertama	8	0
43	Pengolah Data dan Informasi	6	0
44	Operator Layanan Operasional 5	5	0
45	Pengadministrasi Perkantoran	5	0
Jumlah		154	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang :

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Pagu	Jumlah Anggaran
APBD	Tahun 2024	Rp. 28.328.583.000,-	Rp. 29.028.583.000,-
DAU Terarah Pendidikan	Tahun 2024	Rp. 700.000.000,-	
APBD	Tahun 2025	Rp. 33.061.033.600,-	Rp. 33.690.845.200,-
DAU Terarah Kesehatan	Tahun 2025	Rp. 629.811.600,-	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Penetapan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
3. Matrik Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
4. Matrik Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
5. SK Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
6. Pohon Kinerja dan Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
7. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
8. Hasil Rekomendasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
9. LHE SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
10. Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Mendasari Visi dan Misi Bupati Pemalang yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mendukung **Misi ke-6 “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”**, dengan **indikator tujuan** yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan **sasaran** “Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan”.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan konservasi serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	68,92	69,07	69,37	69,52	69,69	69,82
		Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,63
		Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Nilai Indeks Pencemaran Air	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	48,24
		Meningkatnya Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Penyelesaian pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Kelompok/Lemba ga/Masyarakat yang aktif dalam program penyelamatan lingkungan	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
		Meningkatnya luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,074	43,78 %	43,083 %	43,087 %	43,092 %	43,096 %
			Persentase penanganan lahan kritis	0,0363 %	0,0463 %	0,0563 %	0,0663 %	0,0763 %	0,0863 %
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	70,03	70,08	70,12	70,16	70,20	70,24
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan		Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Persampahan	78,57%	78,57%	85,71%	85,71%	92,86%	100%
		Terkelolanya Sampah mulai dari sumbernya	Persentase penanganan sampah	73,99 %	72,92 %	71,83 %	70,95 %	70,00 %	70,00 %
			Persentase pengurangan sampah	23,94 %	25,88 %	26,94 %	27,89 %	30,00 %	30,00 %
3	Meningkatkan kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	72,92	80,15	80,38	80,61	80,84	81,07
		Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	56,01	58,01	60,01	62,01	64,01	66,01
			Indeks Reformasi Birokrasi	54,70	54,90	55,10	55,30	55,50	55,70

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah spebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan komposit parameter	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ dimana : IKU = Indeks Kualitas Udara I_{INA} = Rata-rata indeks SO₂, NO₂ dan PM_{2,5}	DLH

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu		
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	Indeks	Suatu nilai yang menggambarkan kualitas air yang merupakan komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKA Titik Pantau = \sum_i^n w_i I_i$ dimana : IKA = Indeks Kualitas Air W = faktor pembobot I = sub-indkes (Q-Nilai)	DLH
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	Jumlah dokumen lingkungan yang dibutuhkan	(Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang disusun)/(Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang harus disusun pada tahun n) x 100 %	DLH
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	Jumlah usaha/kegiata yang diawasi dan dibina dibagi jumlah usaha/kegiatan yang ada pada tahun berjalan	(Jumlah kegiatan usaha atau kegiatan yang diawasi dan dibina)/(Jumlah kegiatan usaha atau kegiatan yang harus diawasi dan dibina pada tahun n) x 100 %	DLH
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kasus yang ada pada tahun berjalan	(Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,	DLH

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
					izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota) x 100%	
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	Jumlah Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan	Jumlah Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan / Jumlah lembaga masyarakat yang ada	DLH
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	Persentase luas lahan yang ditanami per luas wilayah administrasi	proporsi RTH di wilayah perkotaan, yaitu minimal 30% dari luas wilayah administrasi. Dari proporsi tersebut, 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat.	Disperkim dan DLH
		Persentase penanganan lahan kritis	%	Persentase luas lahan kritis yang ditanami per luas total lahan kritis	(Luas lahan kritis yang direhabilitasi dibagi jumlah luas lahan keseluruhan) x 100%	DLH
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	Kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	(Total sampah yang dapat ditangani)/(Total Timbulan Sampah Kabupaten/Kota) x 100 %	DLH
		Persentase pengurangan sampah	%	Kegiatan pembatasan timbunan, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah	(Total sampah yang dapat dikurangi)/(Total Timbulan Sampah Kabupaten/Kota) x 100 %	DLH
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	data dan informasi yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan	IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur/ Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang	DLH

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				Masyarakat (SKM).		
		Nilai SAKIP	Nilai	ukuran yang mencerminkan sejauh mana suatu instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan akuntabel, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut.	LHE inspektorat	DLH

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	69,67
		Terkendalnya sumber-sumber pencemar	Nilai Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,58
		Terkendalnya sumber-sumber pencemar air	Nilai Indeks Pencemaran Air	Indeks	47,83
		Meningkatnya mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	0,4
		Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
			Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
			Penyelesaian pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100
		Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah kelompok/lembaga/masyarakat yang aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	100
		Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,092
			Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0763
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	70,20
		Meningkatnya pelayanan persampahan	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan	%	92,86
		Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya	Persentase penanganan sampah	%	70
			Persentase pengurangan sampah	%	30
2	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	80,84
		Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	64,01
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,50

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,92
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	75,85
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,092
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0763
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	70
		Persentase pengurangan sampah	%	30
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	80,84
		Nilai SAKIP	Nilai	64,01

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Program		Anggaran (Rp)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	370.081.720
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	800.084.550
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	80.955.000

Program		Anggaran
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	21.023.100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	16.767.500
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	297.373.100
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.025.000
8	Program Pengelolaan Persampahan	12.745.972.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.353.563.230

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Siabu :

Tabel 2.5 Program dan Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP	nilai	64,01
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	%	100
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan	%	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	1

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	%	100
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1.467
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Terselenggaranya Administrasi Umum perangkat daerah	%	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	200

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	9
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	17
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	20
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3
2	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase tersedianya Dokumen RPPLH	%	100
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Terselenggaranya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	%	100
		Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	3
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya KLHS Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	%	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Terselenggaranya KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	Meningkatnya pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya Penyimpanan Sementara LB3	Persentase Penyimpanan sementara LB3	%	100
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	1
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina - Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	% %	100 29
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	%	20
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Menurunnya jumlah kasus pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	%	100
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan	10
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	- Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
4	Meningkatnya Indeks Kualitas Air			- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan	nilai nilai nilai nilai	76,78 75,85 84,92 63,32
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terusunnya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	laporan	1
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Pengelolaan Kehati	dokumen	2
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati Kabupaten Pemalang	Persentase kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100
		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	6
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	410
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat	lembaga	4

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
7	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	- Persentase sampah yang terangkut - Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	% %	82 75
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Persentase pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	%	100
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	4
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	5
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Terlaksananya penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	54.000

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025

Pada tanggal 23 September 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,92
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	Indeks	75,85
3	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,092
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0763
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	70
		Persentase pengurangan sampah	%	30
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	80,84
		Nilai SAKIP	Nilai	64,01

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Program		Anggaran (Rp)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	370.081.720
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	800.084.550
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	80.955.000
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	21.023.100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	16.767.500

Program		Anggaran
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	297.373.100
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.025.000
8	Program Pengelolaan Persampahan	12.745.972.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.353.563.230

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84,92	75,11	88,45	Tinggi	DLH
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	75,85	75,14	99,06	Sangat Tinggi	DLH
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	100	100	Sedang	DLH
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100	Sangat Tinggi	DLH
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100	Sangat Tinggi	DLH
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	100	100	100	Sangat Tinggi	DLH
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,092	43,089	99,99	Sangat Tinggi	DLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
		Persentase penanganan lahan kritis	0,0763	0,067	87,81	Tinggi	DLH
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	70	60,82	86,89	Tinggi	DLH
		Persentase pengurangan sampah	30	25	83,33	Tinggi	DLH
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,84	80,99	100,19	Sangat Tinggi	DLH
		Nilai SAKIP	64,01	69,19	108,09	Sangat Tinggi	DLH

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk “Tujuan/Sasaran” yang diukur sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya indeks kualitas udara dengan indikator kinerja sasaran indeks kualitas udara pada tahun 2025, realisasinya sebesar 75,11 dengan ketercapaian kinerja sebesar 88,45% (**Tinggi**). Indeks kualitas udara mempunyai porsi besar dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pertimbangannya adalah udara merupakan unsur penting dalam kehidupan yang mutlak harus tersedia untuk mempertahankan hidup. Kualitas udara yang baik menjadi indikator suatu ekosistem masih dalam kondisi yang layak sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, perhitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan tiga parameter yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5} dengan rumus perhitungan :

$$IKU = 100 - [50/0.99 \times (I_{INA} - 0.1)]$$

Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, parameter PM_{2,5} mewakili konsentrasi partikel halus diatmosfer, dan parameter SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan

bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 4 lokasi yang mewakili kawasan padat transportasi, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran dan daerah/kawasan industri dengan menggunakan metode Passive Sampler, dilaksanakan dalam 2 periode dengan masing-masing periode pemantauan dilaksanakan selama kurang lebih 14 hari.

Tabel 3.3 Perhitungan IKU Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Periode	Lokasi	Hasil			Indeks			INDEKS INA
		NO2	SO2	PM _{2,5}	NO2	SO2	PM _{2,5}	
Periode I 17-31 Juli 2025	Alun-Alun Kota Pemalang	6,30	19,61	16,76	0,39	0,14	1,1173	0,55
	PT. Daiwabo	4,04	14,98	16,76	0,30	0,09	1,1173	0,50
	Wisma Taman Agung	9,44	10,01	16,76	0,20	0,21	1,1173	0,51
	Kantor DLH Kab. Pemalang	7,35	8,67	16,76	0,17	0,16	1,1173	0,48
Periode II 18 September - 2 Oktober 2025	Alun-Alun Kota Pemalang	5,82	10,42	16,76	0,21	0,13	1,1173	0,49
	PT. Daiwabo	5,62	11,72	16,76	0,23	0,12	1,1173	0,49
	Wisma Taman Agung	6,25	12,80	16,76	0,26	0,14	1,1173	0,50
	Kantor DLH Kab. Pemalang	5,10	12,86	16,76	0,26	0,11	1,1173	0,50
Rata-rata		6,24	12,64	16,76	0,25	0,14	1,12	0,50
BMUA		50	45	15				
Indeks Kualitas Udara		75,11						

Sumber : Hasil Analisa, 2025

- Sasaran meningkatnya indeks kualitas air dengan indikator sasaran indeks kualitas air pada tahun 2025, realisasinya sebesar 75,14 dengan ketercapaian kinerja sebesar 99,06% (**Sangat Tinggi**).

Indeks kualitas air dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan :

$$IKA Titik Pantau = \sum_i^n w_i I_i$$

dimana :
 IKA = Indeks Kualitas Air
 W = faktor pembobot
 I = sub-indkes (Q-Nilai)

Data yang digunakan dalam perhitungan indeks kualitas air tersebut diatas adalah data hasil pemantauan kualitas air di 2 sungai besar di Kabupaten Pemalang yakni Sungai Comal dan Sungai Waluh yang dipantau di 3 titik pantau yang mewakili kawasan hulu, tengah dan hilir sungai pada 2 musim (musim kemarau dan musim penghujan).

Parameter kualitas air Sungai yang dipantau dan dianalisis meliputi Potential of Hydrogen (pH), Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform.

**Tabel 3.4 Hasil Analisis Indeks Pencemaran Kualitas Air
Kabupaten Pemalang Tahun 2025**

Periode Pemantauan	Nama Sungai	Lokasi	pH	TSS	DO	BOD	COD	Nitrat	Total Phospat	Fecal Coli	Pij	Satus Mutu Air
Periode I 16 April 2025	S. Comal	Desa Kebanggan Kec.	8	7	8	2	9,7	2	0,08	10000	10	Cemar Sedang
	S. Comal	Desa Semingkir Kec.	8	60	8	2	13	2	0,1	10000	10	Cemar Sedang
	S. Comal	Desa Kemuning Kec.	8	200	7	2	15	2	0,1	20000	20	Cemar Berat
	S. Waluh	Desa Rembul Kec.	8	5	8	2	12	1	0,08	30000	30	Cemar Berat
	S. Waluh	Desa Glandang Kec.	8	80	8	2	12	2	0,08	30000	30	Cemar Berat
	S. Waluh	Desa Sungapan	8	30	7	2	16	2	0,07	8000	8	Cemar Sedang
Periode II 9 Oktober 2025	S. Comal	Desa Kebanggan Moga	8	2	8	2	9,2	1	0,1	5000	5	Cemar Sedang
	S. Comal	Desa Semingkir Kec.	8,97	6	8	2	10	1	0,07	2000	2	Cemar Ringan
	S. Comal	Desa Kemuning Kec.	8	80	6	2	21	1	0,08	4000	4	Cemar Ringan
	S. Waluh	Desa Rembul Kec.	8	6	7	2	12	0,8	0,02	10000	10	Cemar Sedang
	S. Waluh	Desa Glandang Kec.	8,6	20	7	2	13	1	0,08	3000	3	Cemar Ringan
	S. Waluh	Desa Sungapan Kec. Pemalang	8	13	7	2	17	1	0,09	900	0,9	Memenuhi Baku Mutu

Sumber : Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 12 titik pantau, 3 titik pantau dalam kondisi cemar ringan, 5 titik pantau cemar sedang, 3 titik pantau cemar berat dan 1 titik pantau memenuhi baku mutu. Berikutnya, penentuan nilai indeks kualitas air dilakukan dengan menghitung persentase jumlah sampel berdasarkan status mutu, kemudian dikalikan dengan koefisien sesuai status mutunya. Hasil perhitungan indeks kualitas air Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Pembobotan Akhir Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Titik	Prosentase	Koefisien	Nilai
Baik (memenuhi baku mutu)	1	8,33	70	5,83
Cemar Ringan	3	25	50	12,5
Cemar Sedang	5	41,67	30	12,5
Cemar Berat	3	25	10	2,5
Total	12	100		75,14

3. Sasaran meningkatnya penataan dan penataan lingkungan hidup didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yakni persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan, persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta persentase penyelesaian kasus lingkungan.
- a) Capaian indikator persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan pada tahun 2025, realisasinya sebesar 100% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% (**Sangat Tinggi**).

Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan, dihitung dengan rumus :

$$\begin{array}{l}
 \frac{\text{Jumlah dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yang harus disusun pada tahun n}} \times 100 \% \\
 \frac{4}{4} \times 100 \%
 \end{array}$$

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menargetkan penyusunan 4 dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yakni Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Dokumen IKLH), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (D3TLH) dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang.

- b) Capaian indikator persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 100% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% (**Sangat Tinggi**). Persentase Kegiatan Usaha/Kegiatan yang diawasi dan dibina, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan usaha atau kegiatan yang diawasi dan dibina}}{\text{Jumlah kegiatan usaha atau kegiatan yang harus diawasi dan dibina pada tahun n}} \times 100 \%$$

$$\frac{20}{20} \times 100 \%$$

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati melalui pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Setiap orang/Lembaga/kelompok yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan menaati baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Target kegiatan usaha yang diawasi dan dibina pada Tahun 2025 sebanyak 20 kegiatan dan/atau usaha dan terealisasi sebanyak 20 kegiatan dan/atau usaha

- c) Capaian indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 100% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% (**Sangat Tinggi**).

Penyelesaian Kasus Lingkungan, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin} \\ \text{lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di} \\ \text{terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota,} \\ \text{lokasi usaha dan dampaknya di Daerah} \\ \text{kabupaten/kota yang ditindaklanjuti} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin} \\ \text{lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di} \\ \text{terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota,} \\ \text{lokasi usaha dan dampaknya di Daerah} \\ \text{kabupaten/kota} \end{array}} \times 100 \%$$

$$\frac{10}{10} \times 100 \%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selalu ditindaklanjuti dengan aduan kasus pada Tahun 2025 yang teregistrasi sebanyak 10 aduan.

4. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan indikator sasaran persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 100 % dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% (**Sangat Tinggi**).

Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mengelola} \\ \text{lingkungan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah lembaga masyarakat yang harus tingkatkan} \\ \text{pada tahun n} \end{array}} \times 100 \%$$

$$\frac{12}{12} \times 100 \%$$

Lembaga/keompok masyarakat yang aktif mengelola lingkungan hidup pada tahun 2025 antara lain OPA Shabawana, P4S Bheger, Ecoenzym Pemalang, PKK, Sekolah Adiwiyata, Aliansi Masyarakat Taman Timur (AMTT), Organisasi Lintas Penjaga Mata Air (Limata), Sahabat Hijau Indonesia, DPD Kawali Pemalang, Padepokan Lintang Kemukus, LDII Kab. Pemalang, Kelompok Tani di Desa Mojo, Desa Pesantren, Desa Nyamplungsari, Desa Ketapang, Desa Limbangan, Desa Blendung Kec. Ulujami

5. Sasaran meningkatnya luasan tutupan vegetasi didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan lahan kritis dan persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten.
 - a) Capaian indikator persentase penanganan lahan kritis pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 0,067% dengan ketercapaian kinerja sebesar 87,95% (**Tinggi**).

$$\frac{\text{Luas lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah luas lahan keseluruhan}} \times 100 \%$$

- b) Capaian indikator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 43,089 % dengan ketercapaian kinerja sebesar 99,99% (**Sangat Tinggi**).

6. Sasaran kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah.
 - a) Capaian indikator persentase penanganan sampah pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 60,82% dengan ketercapaian kinerja sebesar 86,89% (**Tinggi**).

Persentase penanganan sampah merupakan perbandingan antara jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertangani dengan jumlah seluruh timbulan sampah di Kabupaten Pemalang.

$$\frac{\text{Total sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan sampah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$$

$$\frac{106.095,4 \text{ ton}}{174.441,7 \text{ ton}} \times 100 \%$$

- b) Capaian indikator persentase pengurangan sampah pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 25% dengan ketercapaian kinerja sebesar 83,33% (Tinggi).

Persentase pengurangan sampah dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total sampah yang dapat dikurangi}}{\text{Total Timbulan sampah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$$

Timbulan sampah yang dapat dikurangi oleh masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga melalui pembatasan timbulan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah pada Tahun 2025 sebesar 43.610,43 ton.

Sampah merupakan kegiatan yang murni dilakukan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, sehingga capaian indikator persentase pengurangan sampah tersebut dapat tercapai apabila ada peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga dalam pengurangan sampah dari sumbernya melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah di sumbernya dan pendauran ulang sampah disumber sampah.

7. Sasaran meningkatnyan kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dan Nilai SAKIP.

- a) Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 80,99 dengan ketercapaian kinerja sebesar 100,19% (**Sangat Tinggi**).

Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh, dapat dihitung dengan rumus SKM sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111111$$

Interprestasi nilai SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melakukan survey kepuasan masyarakat dengan jumlah respoden sebanyak 175 orang pengguna layanan per semester terhadap 9 unsur pelayanan yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan, pengaduan, saran, masukan. Dari 140 responden tersebut, diperoleh nilai IKM unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 80,99.

- b) Capaian Nilai SAKIP pada Tahun 2025, realisasinya sebesar 69,19 dengan ketercapaian kinerja sebesar 108,09% (**Sangat Tinggi**). Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pematang, hasil penilaian terhadap setiap komponen evaluasi AKIP sebagai berikut :

Tabel 3.6 Hasil Penilaian Komponen Evaluasi AKIP Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	23,09
Pengukuran Kinerja	30	20,80
Pelaporan Kinerja	15	10,13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	15,17
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	69,19

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	85,49	92,83	84,92	75,11	88,45
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	53,33	48,33	75,85	75,14	99,06
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	66,67	100	100	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	40	60	100	100	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,078	43,083	43,092	43,089	99,99
		Persentase penanganan lahan kritis	0,0463	0,000154	0,0763	0,067	87,81
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	59,60	50,46	70	60,82	86,89
		Persentase pengurangan sampah	25,91	25,00	30	25	83,33
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,32	80,42	80,84	80,99	100,19
		Nilai SAKIP	63,25	64,44	64,01	69,19	108,09

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran melalui indikator sasaran secara lengkap sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya indeks kualitas udara dengan indikator sasaran indeks kualitas udara, pada tahun 2023 realisasinya sebesar 85,49 dan pada tahun 2024 sebesar 92,83 atau naik sebesar 7,34 point. Kemudian pada tahun 2025, realisasi indeks kualitas udara mengalami penurunan menjadi 75,11 atau turun sebesar 17,72 point dari tahun 2024.

Realisasi indeks kualitas air menempati peringkat 24 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 388 dari 514 Kabupaten/Kota di tingkat nasional.

Realisasi indeks kualitas udara pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan penambahan parameter partikulat $PM_{2,5}$ sebagai komponen perhitungan indeks kualitas udara yang sebelumnya hanya parameter SO_2 dan NO_2 .

Partikulat $PM_{2,5}$ merupakan partikel berukuran sangat kecil ($\leq 2,5$ mikrometer) yang mudah terhirup hingga ke saluran pernapasan bawah dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas udara. Selain faktor $PM_{2,5}$, aktivitas manusia berperan besar dalam penurunan kualitas udara.

Tekanan terhadap pencapaian indeks kualitas udara di tahun-tahun berikutnya besar dikarenakan :

- a) Meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya berakibat pada peningkatan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar minyak yang menghasilkan emisi udara;
- b) Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Pemalang baik sektor industri, jasa, Kesehatan, perdagangan serta usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan emisi udara dari penggunaan boiler, genset dan alat pembakaran lainnya;
- c) Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun;
- d) Berkurangnya tutupan vegetasi sebagai penyerap karbon dikarenakan alih fungsi lahan.

2. Sasaran meningkatnya indeks kualitas air dengan indikator sasaran indeks kualitas air, pada tahun 2023 realisasinya sebesar 53,33 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 48,33 atau turun sebesar 5 point. Kemudian pada tahun 2025, realisasi indeks kualitas air mengalami peningkatan menjadi 75,14 atau naik 26,81 point dari tahun 2024.

Peningkatan realisasi indeks kualitas air pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas air Sungai dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan berkurangnya tekanan pencemaran air serta adanya upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran yang lebih efektif.

Realisasi indeks kualitas air menempati peringkat 14 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 175 dari 514 Kabupaten/Kota di tingkat nasional.

Tekanan terhadap pencapaian indeks kualitas air di tahun-tahun berikutnya besar dikarenakan :

- a) Setiap aktivitas makhluk hidup berpotensi menghasilkan air limbah, sehingga tekanan pencemaran sungai akan tinggi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembuangan air limbah domestik atau buang air besar sembarangan di sungai;
 - b) Terbatasnya kemampuan umkm dan industri kecil untuk mengolah air limbahnya dengan standar pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air/sungai;
 - c) Rendahnya komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup khususnya terkait pengelolaan limbah.
3. Sasaran meningkatnya penataan dan penataan lingkungan hidup didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yakni persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan, persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta persentase penyelesaian kasus lingkungan.
 - a) Realisasi indikator persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan pada tahun 2023 mencapai 100%

dan sudah mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2024 hanya mencapai 66,67% atau mengalami penurunan sebesar 33,33%. Kemudian pada tahun 2025, realisasi mengalami peningkatan menjadi 100% atau naik 33,33 point dari tahun 2024.

Target penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan terealisasi seluruhnya yakni Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review RTRW Kab. Pematang Jaya.

- b) Realisasi indikator persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 100% dan pada tahun 2025 realisasinya juga mencapai 100%. Baik tahun 2023, tahun 2024 maupun tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya telah melakukan pengawasan kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- c) Capaian indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 100% dan pada tahun 2025 realisasinya juga mencapai 100%. Baik tahun 2023, tahun 2024 maupun tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya selalu ditindaklanjuti.

- 4. Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan indikator sasaran persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan, pada tahun 2023 realisasinya sebesar 40% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 60% atau naik sebesar 20%. Kemudian pada tahun 2025, realisasi persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan mengalami

- peningkatan menjadi 100% atau naik sebesar 40% dari tahun 2024. Realisasi persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan pada tahun 2023, tahun 2024 maupun tahun 2025 sesuai atau memenuhi target kinerja yang direncanakan.
5. Sasaran Peningkatan luasan tutupan vegetasi didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan persentase penanganan lahan kritis.
 - a. Realisasi indikator persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada tahun 2023 sebesar 43,078% dan tahun 2024 sebesar 43,083% atau mengalami peningkatan sebesar 0,005%. Pada tahun 2025 realisasinya sebesar 43,089% atau mengalami peningkatan sebesar 0,006%. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, realisasi indikator tersebut belum memenuhi target yang direncanakan.
 - b. Realisasi persentase penanganan lahan kritis pada tahun 2023 sebesar 0,0463% dan tahun 2024 sebesar 0,000154% mengalami penurunan sebesar 0,0461%. Pada tahun 2025, realisasi penanganan lahan kritis sebesar 0,067% atau naik sebesar 0,067%.
 6. Sasaran kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah.
 - a. Realisasi indikator persentase penanganan sampah pada tahun 2023 sebesar 59,60% dan tahun 2024 sebesar 50,46% atau mengalami penurunan sebesar 9,14%. Kemudian pada tahun 2025 realisasinya sebesar 60,82% atau mengalami peningkatan sebesar 10,36%.
 - b. Realisasi indikator persentase pengurangan sampah pada tahun 2023 sebesar 25,91% dan tahun 2024 sebesar 25%. Pada tahun 2025, sama seperti tahun 2024 sebesar 25%.
 7. Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dan Nilai SAKIP.
 - a. Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 80,32 dan tahun 2024 sebesar 80,42 atau mengalami peningkatan sebesar 0,1.

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 80,99 atau mengalami peningkatan sebesar 0,57.

- b. Realisasi indikator Nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 63,25 dan tahun 2024 sebesar 64,44 atau mengalami peningkatan sebesar 1,19. Realisasi Nilai SAKIP pada tahun 2025 sebesar 69,19 atau mengalami peningkatan sebesar 5,32.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	75,11	89,63	83,80
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	75,14	48,24	155,76
3	Meningkatnya Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	100	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	100	100	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,089	43,096	99,98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
		Persentase penanganan lahan kritis	0,067	0,0863	77,64
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	60,82	70	86,89
		Persentase pengurangan sampah	25	30	83,33
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,99	81,07	99,90
		Nilai SAKIP	69,19	55,70	124,22
Total Realisasi Kinerja			829,406	817,82	98,60

Berdasarkan data yang disajikan, total realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar **[829,406]**. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar **[98,60]**. Data ini menunjukkan adanya progres yang signifikan dari realisasi capaian kinerja sasaran strategis per tahun dan dibutuhkan peningkatan performa di beberapa sasaran strategis yang masih dibawah target.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil :

1. Mereviu Tujuan agar Jelas dan Terukur: memastikan tujuan tersebut terukur, realistis, dan memiliki tenggat waktu yang jelas.
2. Melakukan Analisis Situasi dan Sumber Daya: analisis menyeluruh terhadap kondisi saat ini, baik dari segi sumber daya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT).
3. Menyusun Rencana Strategis: menyusun rencana tindakan yang rinci, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan sumber daya yang dibutuhkan.
4. Manajemen Risiko dan Solusi: mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan dan mempersiapkan solusi atau langkah mitigasi yang tepat untuk menghadapinya.

- Melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Berkala: melakukan pemantauan rutin untuk memastikan progres menuju target.
- Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan: meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat, melalui pelatihan atau program pengembangan lainnya.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	75,11	-	76,86	75,76	-
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	75,14	-	72,70	69,86	-
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	-	-	-	-
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	-	-	-	-
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	-	-	-	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	100	-	-	-	-
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,089	-	-	-	-
		Persentase penanganan lahan kritis	0,067	-	-	-	-
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	60,82	-	-	-	-
		Persentase pengurangan sampah	25	-	-	-	-
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,99	-	-	-	82,17
		Nilai SAKIP	69,19	-	-	-	69,02

Berdasarkan data yang disajikan, untuk realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2025 sebesar **75,11**. Jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Pekalongan sebesar **75,76** dan realisasi Provinsi Jawa Tengah **76,86**, realisasi kinerja Kabupaten Pemalang **di bawah** realisasi Kabupaten Pekalongan maupun Provinsi Jawa Tengah. Untuk realisasi kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2025 sebesar **75,14**. Jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Pekalongan sebesar **69,86** dan Provinsi Jawa Tengah **72,70**, realisasi kinerja Kabupaten Pemalang **di atas** realisasi Kabupaten Pekalongan maupun Provinsi Jawa Tengah.

Adapun untuk realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar **80,99**, jika dibandingkan dengan realisasi salah satu OPD lain di Kabupaten Pemalang yakni Dinas Perhubungan sebesar

82,17, realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang **di bawah** realisasi tersebut. Jenis layanan yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang meliputi :

1. Layanan pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Layanan persetujuan lingkungan (DELH/AMDAL/DPLH/UKL-UPL), SPPL;
3. Layanan pemberian persetujuan teknis penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
4. Layanan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
5. Layanan jasa kebersihan dan pengangkutan sampah;
6. Layanan sedot tinja;
7. Layanan pengujian dan/atau pengambilan sampel air (air permukaan dan air limbah).

Jenis layanan yang disurvei pada tahun 2025 hanya 6 jenis layanan kecuali layanan sedot tinja karena layanan tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2024. Unsur pelayanan yang disurvei meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.

Untuk realisasi kinerja Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar **69,19**, jika dibandingkan dengan realisasi salah satu OPD lain di Kabupaten Pemalang yakni Dinas Perhubungan sebesar **69,02**, realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang **di atas** realisasi tersebut.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84,92	75,11	88,45	Nilai ini mengindikasikan kualitas udara Kabupaten Pematang adalah “SEDANG” . Parameter PM _{2,5} yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) saat ini masih bersumber dari data citra satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersifat tahunan, sehingga nilai yang dihasilkan merupakan rerata spasial dan temporal dalam satu tahun pengamatan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan fluktuasi harian dan musiman konsentrasi PM _{2,5} yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik, kondisi meteorologis, serta kejadian episodik seperti pembakaran terbuka dan peningkatan volume lalu lintas.	Dalam rangka meningkatkan akurasi, representativitas, dan keandalan data PM _{2,5} , diperlukan tambahan alat/metode pemantauan kualitas udara yang mampu merekam konsentrasi PM _{2,5} secara kontinu atau harian sesuai PerMenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Data hasil pemantauan langsung tersebut akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola temporal PM _{2,5} , mendukung validasi data satelit, serta menjadi dasar yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan, penentuan langkah pengendalian, dan evaluasi kinerja pengelolaan kualitas udara daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	75,85	75,14	99,06	Nilai ini mengindikasikan kualitas air sungai Kabupaten Pematang adalah “SEDANG” Hasil Dari 8 parameter kualitas air sungai yang dipantau di 12 titik sungai, parameter Fecal Coliform di 11 titik sungai melebihi baku mutu. Parameter Fecal Coliform yang melebihi baku mutu menunjukkan bahwa air sungai terkontaminasi air limbah berasal dari aktivitas domestik, yang ditemukan dalam kotoran manusia dan hewan. Kontaminasi air sungai dengan bakteri Fecal Coliform diduga bersumber dari pembuangan tinja maupun aktivitas peternakan hewan di sekitar sungai.	Bentuk penanganan terhadap kualitas air sungai dapat dilakukan antara lain : 1. Mewajibkan kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan air limbah untuk memiliki IPAL; 2. Bekerjasama dengan OPD terkait seperti DPUTR dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan/atau penyuluhan mengenai pengelolaan sungai kepada warga yang bermukim dibantaran sungai dan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga; 3. Bekerjasama dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian untuk mengedukasi petani dan peternak untuk budidaya pertanian dan peternakan ramah lingkungan; 4. Menambah titik pantau kualitas air sungai dan periode pemantauan kualitas air sungai.
3	Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	100	100	Penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan sehingga 4 dokumen/kajian dapat tersusun.	Menyusun timeline jadwal penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100	Kuantitas SDM yang masih dapat dioptimalkan meskipun jumlahnya terbatas dibandingkan dengan jumlah kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Pemalang.	Pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha/kegiatan dilakukan secara rutin
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100	Jumlah aduan yang masuk dan yang ditindaklanjuti terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebanyak 10 aduan.	Melakukan verifikasi pengaduan yang diterima untuk kemudian ditindaklanjuti.
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	100	100	100	Kuantitas SDM yang masih dapat dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan meskipun jumlahnya terbatas	Sosialisasi dan/atau penyuluhan terhadap masyarakat/lembaga/kelompok masyarakat terkait pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah dilakukan secara rutin
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,092	43,089	99,99	Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun	- Memastikan ketentuan Perda RTRW khususnya terkait penyediaan/ pemenuhan Ruang terbuka Hijau di pada kegiatan dan/atau usaha yang akan beroperasi di Kab. Pemalang; - Melakukan kegiatan penanaman pohon penghijauan di Taman/RTH Publik, sempadan
		Persentase penanganan lahan kritis	0,0763	0,067	87,81	Kontur tanah Kabupaten Pemalang yang berada di daerah Selatan dengan kemiringan lebih dari 15% berpotensi menjadi lahan kritis karena rawan longsor	- Melakukan kegiatan konservasi lingkungan melalui penanaman pohon - Melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti DLHK Prov. Jateng dan Kementerian LH/BPLH terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	70	60,82	86,89	1. Meningkatnya timbulan sampah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan SDM pengelola sampah; 3. Tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Pemalang ditutup; 4. Minimnya inovasi pengelolaan sampah.	1. Operasional TPS sementara dengan controlled landfill. 2. Operasional TPST dan TPS 3R. 3. Sosialisasi dan edukasi pilah sampah di rumah dan sekolah. 4. Pelatihan pengelolaan sampah di masyarakat. 5. Pembinaan Desa Mandiri Sampah. 6. Penambahan jadwal pengolahan sampah di TPS 3R. 7. Pembuatan sumur sampah. 8. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah. 9. Bekerjasama dengan OPD terkait seperti DPUTR Kab. Pemalang untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 10. Upaya kolaboratif bersama dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, dan Kab. Batang untuk pengelolaan sampah menjadi energi (PSEL) bekerjasama dengan PT. L-Energi Green
		Persentase pengurangan sampah	30	25	83,33	1. Masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga dalam pengelolaan sampah; 2. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah mutlak menjadi tugas pemerintah	1. Sosialisasi/pelatihan/peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan secara rutin 2. Mendorong desa untuk mengelola sampah secara mandiri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,84	80,99	100,19	Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;	Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik
		Nilai SAKIP	64,01	69,19	108,09	Dengan menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja	Melakukan Perbaikan Berkelanjutan menginisiasi adanya evaluasi rutin tiap awal minggu terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, progress kinerja, temuan pemeriksaan

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut diatas, sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	84,92	75,11	88,45	800.084.550	780.204.407	97,52	2,48 %
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	75,85	75,14	99,06	800.084.550	780.204.407	97,52	2,48 %
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	100	100	100	412.897.320	313.471.870	75,92	24,08 %
		100	100	100				
		100	100	100				
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100	100	100	614.672.100	565.542.440	92,01	7,99 %
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	43,092	43,089	99,99	80.955.000	76.769.900	94,83	5,17 %
		0,0763	0,067	87,81				
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	70	60,82	86,89	12.745.972.000	12.484.408.980	97,95	2,05 %
		30	25	83,33				
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	80,84	80,99	100,19	19.353.563.230	18.405.877.009	95,10	4,9 %
		64,01	69,19	108,09				

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Tujuan/Sasaran **Meningkatnya Indeks Kualitas Udara** mencapai efisiensi **2,48%** atau sebesar **Rp.19.880.143,-** yang termasuk dalam kategori "**Efisien**", karena persentase capaian

indikator sasaran tersebut masuk kategori sangat tinggi. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, karena adanya "proses kerja yang telah distandarisasi"

2. Tujuan/Sasaran **Meningkatnya Indeks Kualitas Air** mencapai efisiensi **2,48%** atau sebesar **Rp.19.880.143,-** yang termasuk dalam kategori "**Efisien**", karena persentase capaian indikator sasaran tersebut masuk kategori sangat tinggi. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, karena adanya "proses kerja yang telah distandarisasi"
3. Tujuan/Sasaran **Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup** mencapai efisiensi **24,08%** atau sebesar **Rp.99.425.450,-** yang termasuk dalam kategori "**Tidak Efisien**", karena meskipun capaian indikator sasaran masuk kategori sangat tinggi, persentase realisasi anggaran masuk kategori sedang. Terdapat 1 tahapan setelah penyusunan dokumen KLHS Revisi RTRW yang belum bisa dilaksanakan yakni Validasi KLHS Revisi RTRW oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Tujuan/Sasaran **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan** mencapai efisiensi **7,99%** atau sebesar **Rp.49.129.660,-** yang termasuk dalam kategori "**Efisien**" karena persentase capaian indikator sasaran tersebut masuk kategori sangat tinggi. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, karena adanya "proses kerja yang telah distandarisasi".
5. Tujuan/Sasaran **Peningkatan luasan tutupan vegetasi** mencapai efisiensi **5,17%** atau sebesar **Rp.4.185.100,-** yang termasuk dalam kategori "**Efisien**", karena persentase capaian indikator sasaran tersebut masuk kategori tinggi. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, karena adanya "proses kerja yang telah distandarisasi".

6. Tujuan/Sasaran **Meningkatnya Kualitas pengurangan dan penanganan sampah** mencapai efisiensi **2,05%** atau sebesar **Rp.261.563.020,-** yang termasuk dalam kategori "**Efisien**", karena persentase capaian indikator sasaran tersebut masuk kategori tinggi. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, karena adanya "proses kerja yang telah distandarisasi".
7. Tujuan/Sasaran **Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan** mencapai efisiensi **4,9%** atau sebesar **Rp.947.686.221,-** yang termasuk dalam kategori "**Efisien**" karena persentase capaian indikator sasaran tersebut masuk kategori sangat tinggi. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, karena adanya "proses kerja yang telah distandarisasi".

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	88,45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan	100 94,41 99,06 88,45 99,62	Menunjang	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berfokus pada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan. Pada program ini, dilaksanakan aktivitas/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran indeks kualitas air dan udara yakni pemantauan kualitas air dan udara, penyusunan kajian mitigasi perubahan iklim, serta aksi adaptasi/mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan penanaman pohon, pengelolaan laboratorium lingkungan, pemeliharaan IPAL ATBM di Wanarejan Utara serta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks Kualitas Air	99,06	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan	100 94,41 99,06 88,45 99,62	Menunjang	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berfokus pada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan. Pada program ini, dilaksanakan aktivitas/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran indeks kualitas air dan udara yakni pemantauan kualitas air dan udara, penyusunan kajian mitigasi perubahan iklim, serta aksi adaptasi/mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan penanaman pohon, pengelolaan laboratorium lingkungan, pemeliharaan IPAL ATBM di Wanarejan Utara serta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
3	Meningkatnya Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	- Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup	- Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	Menunjang	Program perencanaan lingkungan hidup, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) serta program penanganan pengaduan lingkungan hidup menunjang pencapaian sasaran meningkatnya penataan dan penataan lingkungan hidup karena keempat program tersebut berperan dalam memperkuat perencanaan, pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
		- Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	100		
					- Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	25		
				- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	- Persentase Pengendalian B3 & LB3	100		
				- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	100	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Subkegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	- Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 100	Menunjang	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta subkegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan menunjang pencapaian indikator sasaran persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan karena pada program dan subkegiatan ini dilaksanakan aktivitas/kegiatan antara lain pendampingan Proklam, pelatihan pengelolaan sampah, Sosialisasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, Saka kalpataru, dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	- Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik - Persentase penanganan lahan kritis	99,99 87,81	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Kehati	100	Menunjang	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) menunjang pencapaian sasaran peningkatan luasan tutupan vegetasi karena aktivitas yang dilaksanakan pada program ini adalah pengadaan tanaman untuk penghijauan dan konservasi.
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	- Persentase penanganan sampah - Persentase pengurangan sampah -	60,82 25	Program Pengelolaan Persampahan	- Persentase sampah yang terangkut - Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota)	71,02 85	Menunjang	Program pengelolaan persampahan menunjang pencapaian sasaran kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat karena pada program ini dilaksanakan aktivitas/kegiatan yang terkait antara lain peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti insenerator, kontainer sampah, tempat sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah, penyusunan materplan/roadmap pengelolaan sampah di Kab. Pemalang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh - Nilai SAKIP	100,19 108,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai SAKIP	108,09	Menunjang	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan karena pada program ini dilaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan layanan umum dan kepegawaian serta penyusunan dokumen perencanaan, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** memiliki realisasi kinerja sebesar **95.10 %**, yang termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
2. Program **Perencanaan Lingkungan Hidup** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **74,21%**, yang termasuk dalam kategori "**Sangat Rendah**". Meskipun pencapaian realisasi anggaran tersebut sangat rendah, namun program tersebut **menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi 3 target yang diinginkan.
3. Program **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **97.52%**. yang termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun target indeks kualitas udara dan indeks kualitas air belum tercapai, yang disebabkan oleh faktor eksternal yakni penambahan parameter partikulat PM_{2,5} untuk indeks kualitas udara dan tinggi Fecal Coliform di 11 titik Sungai akibat pembuangan air limbah domestik dari kotoran manusia dan hewan.
4. Program **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **94,83%**. yang termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meskipun tidak tercapai, karena penanganan lahan kritis di kawasan hutan dan kawasan konservasi masuk kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

5. Program **Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **84,12%**. yang termasuk dalam kategori "**Sedang**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
6. Program **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **96,52%**. yang termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
7. Program **Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **86,17%**. yang termasuk dalam kategori "**Sedang**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
8. Program **Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** mencatat **capaian realisasi anggaran sebesar 98,47%** yang termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan.
9. Program **Pengelolaan Persampahan** mencatat **capaian realisasi anggaran sebesar 97,95%** yang termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Pencapaian tersebut **menunjang** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun tidak tercapai. Kondisi pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang yang tidak normal/tidak optimal karena tidak ada tempat pemrosesan akhir sampah sejak ditutupnya TPA Pesalakan Desa Pegongsoran oleh masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Uraian	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	33.690.845.200	32.316.981.726	95,92
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	370.081.720	274.654.940	74,21
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	195.906.720	182.934.140	93,38
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	195.906.720	182.934.140	93,38
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	174.175.000	91.720.800	52,66
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	174.175.000	91.720.800	52,66
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	800.084.550	780.204.407	97,52
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	800.084.550	780.204.407	97,52
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	248.381.400	243.561.760	98,06
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16.046.800	13.310.100	82,95
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	141.296.050	135.495.500	95,89
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	394.360.300	387.837.047	98,35
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	80.955.000	76.769.900	94,83
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	80.955.000	76.769.900	94,83
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80.955.000	76.769.900	94,83
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	21.023.100	17.684.430	84,12
Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.023.100	17.684.430	84,12
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.023.100	17.684.430	84,12
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	16.767.500	16.184.500	96,52
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Perlindungan	16.767.500	16.184.500	96,52

Uraian	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan
dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.767.500	16.184.500	96,52
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	297.373.100	256.249.560	86,17
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	297.373.100	256.249.560	86,17
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	93.779.600	67.393.960	71,86
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	43.241.500	42.444.800	98,16
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	160.352.000	146.410.800	91,31
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.025.000	4.948.000	98,47
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	5.025.000	4.948.000	98,47
Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.025.000	4.948.000	98,47
Program Pengelolaan Persampahan	12.745.972.000	12.484.408.980	97,95
Pengelolaan Sampah	12.745.972.000	12.484.408.980	97,95
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	317.299.000	309.292.880	97,48
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	5.850.000.000	5.638.750.805	96,39
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	562.691.000	537.930.000	95,60
Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	6.015.982.000	5.998.435.295	99,71
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	19.353.563.230	18.405.877.009	95,10
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.811.220	12.198.883	95,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.774.880	10.280.783	95,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.036.340	1.918.100	94,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.357.008.140	13.631.203.110	94,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.343.519.000	13.617.963.738	94,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.464.720	1.457.000	99,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	10.353.320	10.122.372	97,77

Uraian	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.671.100	1.660.000	99,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.930.620	335.046.890	95,47
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350.930.620	335.046.890	95,47
Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.121.150	317.628.329	94,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.194.000	5.130.670	98,78
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.248.700	11.770.000	96,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.044.950	126.520.282	95,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.052.000	17.033.452	99,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12.750.000	12.693.750	99,56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.831.500	144.480.175	92,72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.813.050	186.435.750	93,77
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	42.051.000	84,10
Pengadaan Mebel	30.693.050	28.841.250	93,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.120.000	115.543.500	97,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.719.651.050	3.544.732.492	95,30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.120.050	6.110.000	99,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	192.599.000	183.665.264	95,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.520.932.000	3.354.957.228	95,29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.228.000	378.631.555	99,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	88.473.000	88.112.166	99,59
Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.472.500	98,17
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	264.495.000	264.373.389	99,95
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.760.000	24.673.500	99,65

Sumber : Evaluasi RKPD TW 4 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **95,10%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Tinggi**. Adapun sisa anggaran terbesar pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ini berasal dari sisa penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 725.555.262,-.
2. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **74,21%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Rendah**. Terdapat 1 tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu Proses Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review RTRW Kabupaten Pematang di DLHK Provinsi Jawa Tengah.
3. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **97,52%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Tinggi**. Adapun sisa anggaran terbesar pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini berasal dari sisa belanja bahan kimia pada subkegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota.
4. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **94,83%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Tinggi**. Adapun Sisa anggaran terbesar pada program pengelolaan keanekaragaman hayati ini berasal dari sisa belanja bahan bakar minyak dan pelumas serta jalan tol.
5. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **84,12%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sedang**. Adapun sisa anggaran terbesar pada program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berasal dari sisa belanja bahan bakar minyak dan pelumas.

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **96,52%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Tinggi**. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan tambahan personil Pengawas Lingkungan Hidup (CPNS) sebanyak 3 orang yang membantu dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan/atau usaha yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
7. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **86,17%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sedang**. Adapun sisa anggaran terbesar pada program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat berasal dari sisa kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup khususnya pelaksanaan sosialisasi sekolah adiwiyata.
8. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **98,47%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Tinggi**. Terdapat 10 Pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diterima dan ditindaklanjuti dari target 10 pengaduan pada tahun 2025.
9. **Program Pengelolaan Persampahan** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **97,95%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi **Sangat Tinggi**. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program ditengah kondisi pengelolaan sampah Kabupaten Pematang Jaya yang tidak normal karena tidak ada tempat pemrosesan akhir sampah sejak ditutupnya TPA Pesalakan Desa Pegongsoran oleh masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki 7 sasaran strategis dengan 3 sasaran strategis tercapai dan 4 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Sasaran strategis yang tercapai antara lain :
 - a. Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Udara dengan realisasi indikator kinerja Indeks Pencemaran Udara tahun 2025 sebesar 75,11 atau tercapai 88,45%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air dengan realisasi indikator kinerja Indeks Pencemaran Air tahun 2025 sebesar 75,14 atau tercapai 99,06%.
 - c. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dengan realisasi indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Aktif Mengelola Lingkungan tahun 2025 sebesar 100 % atau tercapai 100 %.
3. Sasaran strategis yang tidak tercapai antara lain :
 - a. Sasaran Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup didukung oleh 3 indikator kinerja yakni Persentase Ketersediaan

Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan, Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina dan Penyelesaian Kasus Lingkungan. Indikator kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan realisasinya sebesar 100 % atau tercapai sebesar 100%. Dua indikator kinerja yakni Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta Penyelesaian Kasus Lingkungan realisasinya juga sebesar 100 % atau tercapai 100 %.

- b. Sasaran Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi didukung oleh 2 indikator kinerja yakni Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Persentase Penanganan Lahan Kritis. Indikator kinerja Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik realisasinya sebesar 43,089 atau tercapai 99,99 % dan Indikator kinerja Persentase Penanganan Lahan Kritis realisasinya sebesar 0,067 atau tercapai 87,81 %. Sasaran Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi tersebut tidak tercapai karena 2 indikator kinerjanya tidak tercapai.
- c. Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat didukung oleh 2 indikator kinerja yakni Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah realisasinya sebesar 60,82 % atau tercapai 86,89 % dan indikator Persentase Pengurangan Sampah realisasinya sebesar 25 % atau tercapai 83,33 %. Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat tersebut tidak tercapai karena 2 indikator kinerjanya tidak tercapai.
- d. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan didukung oleh 2 indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dan Nilai SAKIP. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh realisasinya sebesar 80,99 atau tercapai 100,19 % dan indikator kinerja Nilai SAKIP realisasinya sebesar 69,19 atau tercapai 108,09 %.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya adalah :

1. Keterbatasan sumber daya khususnya yang memiliki kompetensi khusus misalnya teknologi informasi, analisis Teknik dll.
2. Masalah operasional: masalah operasional seperti proses bisnis yang tidak efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dan

masalah komunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target kinerja .

3. Kurangnya Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

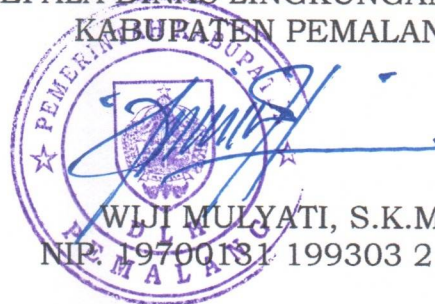
Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran untuk memastikan bahwa program kegiatan sejalan dengan tugas fungsi organisasi serta dapat difokuskan pada hal yang benar - benar penting dan memiliki dampak positif kepada masyarakat .
2. Pengembangan rencana aksi: pengembangan rencana aksi memastikan bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi harus memuat detail tentang tindakan yang diambil, tanggung jawab individu dan timeline yang seksama.
3. Melakukan analisis kebutuhan dan alokasi sumber daya.
4. Kepatuhan terhadap Prinsip - prinsip Good Governance: memastikan instansi beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

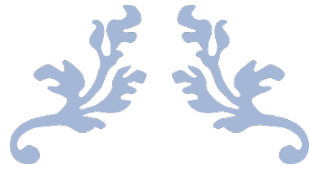
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pemalang.

Pemalang , 31 Desember 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



WIJI MULYATI, S.K.M
NIP. 19700131 199303 2 003



LAMPIRAN

**LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Gatot Subroto No.28 Bojongbata, Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telp/fax. (0284) 322121 Pos el : dlhpemalangkab@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIJI MULYATI, S.K.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANOM WIDIYANTORO**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 21 April 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

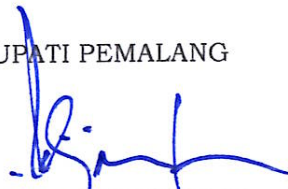
WIJI MULYATI, S.K.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

No	Sasaran	Indikator Utama	Satuan	Target Tahun 2025	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1	Meningkatnya Indeks kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,92	-	-	-	84,92
2	Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	75,85	-	-	-	75,85
3	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	-	-	-	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	-	-	-	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100	-	-	-	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	100	-	-	-	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,092	-	-	-	43,092
		Persentase Penanganan Lahan Kritis	%	0,0763	-	-	-	0,0763
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase Penanganan sampah	%	70,00	-	-	-	70,00
		Persentase pengurangan sampah	%	30,00	-	-	-	30,00
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	80,84	-	80,84	-	80,84
		Nilai SAKIP	nilai	64,01	-	-	64,01	-

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	270.681.720,00	APBD
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	784.784.550,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	84.455.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	21.023.100,00	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14.167.500,00	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	297.373.100,00	APBD
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	3.025.000,00	APBD
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.327.422.000,00	APBD
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.259.400.230,00	APBD
JUMLAH		30.062.332.200,00	APBD

Pemalang, 21 April 2025

Pihak Kedua,
 BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 28, Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 322121, Laman www.dlh.pemalangkab.go.id
Surel : klh_pemalangkab@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIJI MULYATI,S.K.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANOM WIDIYANTORO**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 22 September 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI,S.K.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1	Meningkatnya Indeks kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,92	-	-	-	84,92
2	Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	75,85	-	-	-	75,85
3	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	-	-	-	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	-	-	-	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100	-	-	-	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	100	-	-	-	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,092	-	-	-	43,092
		Persentase Penanganan Lahan Kritis	%	0,0763	-	-	-	0,0763
6		Persentase Penanganan sampah	%	70,00	-	-	-	70,00

	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	-	-	-	30,00
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	80,84	-	80,70	-	80,84
		Nilai SAKIP	nilai	69,19	-	-	69,19	-

Dipindah ke JW II

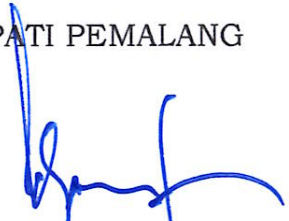
No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	370.081.720,00	APBD
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	800.084.550,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	80.955.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	21.023.100,00	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	16.767.500,00	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	297.373.100,00	APBD
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.025.000,00	APBD
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.745.972.000,00	APBD
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.353.563.230,00	APBD

JUMLAH	33.690.845.200,00	APBD
---------------	--------------------------	------

Pemalang, 22 September 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG


ANOM WIDIYANTORO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG


WIJI MULYATI, S.K.M.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021-2026



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kab. Pemalang

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan & Sasaran PD	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan konservasi serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68,90	68,92	69,07	69,37	69,52	69,67	69,82	69,82
	Terkendalinya sumber sumber pencemar Udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	indeks	85,62	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,63	89,63
	Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air	Nilai indeks pencemaran Air	indeks	47,33	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	48,24	48,24
	Meningkatnya Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Meningkatnya luasan tutupan vegetasi	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala kabupaten	%	43,070	43,074	43,078	43,083	43,087	43,092	43,096	43,096
		Persentase Penanganan Lahan Kritis	%	0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0663	0,0763	0,0863	0,0863
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	70,00	70,03	70,08	70,12	70,16	70,20	70,24	70,24
	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan & Sasaran PD	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lingkungan hidup									
	Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Kelompok/Lembaga/ Masyarakat yang Aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	50	60	70	80	90	100	100	100
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.		Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Persampahan	%	71,43	78,57	78,57	85,71	85,,71	92.86	100	100
	Terkelolanya Sampah Mulai dari Sumbernya	Persentase Penanganan sampah	%	74.97	73,99	72,92	71,83	70,95	70,00	70,00	70,00
		Persentase pengurangan sampah	%	22.88	23,94	25,88	26,94	27,89	30,00	30,00	30,00
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	%	78,92	79.92	80,15	80,38	80,61	80,84	81,07	81,07
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	53,89	56,01	58,01	60,01	62,01	64,01	66,01	66,01
		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	54,40	54,70	54,90	55,10	55,30	55,50	55,70	55,70



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENJA RENCANA KERJA



2025

lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	69,67
	Terkendalinya sumber pencemar udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,58
	Terkendalinya sumber pencemar air	Nilai Indeks Pencemaran Air	Indeks	47,83
	Meningkatnya mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	0,4
	Meningkatnya luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala Kabupaten	%	43,092
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0763
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	70,20
	Meningkatnya penataan dan penataan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100
		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100
	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah kelompok/lembaga/masyarakat yang aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	100
	Meningkatnya pelayanan persampahan	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan	%	92,86
	Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya	Persentase penanganan sampah	%	70,00
		Persentase pengurangan sampah	%	30,00
Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	%	80,84
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	64,01
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,50



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 600-4/091.2/DLH/2024

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. Bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Pemalang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana P Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN:

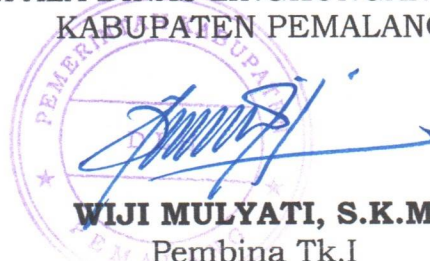
Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Tujuan ditetapkan nya Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 23 September 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**



WIJI MULYATI, S.K.M

Pembina Tk.I

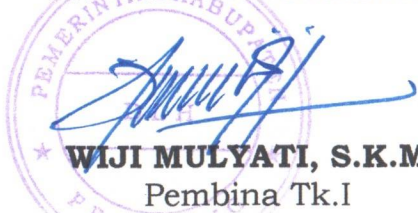
NIP. 19700131 199303 2 003

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan konservasi serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,37	89,43	89,48	89,53	84,92	84,93	84,93
		Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	46,24	46,56	47,28	47,59	75,85	75,95	75,95
		Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase kegiatan udara/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Penyelesaian kasus lingkungan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	15 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
		Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,074	43,78 %	43,083 %	43,087 %	43,092 %	43,096 %	43,096 %
			Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0363 %	0,0463 %	0,0563 %	0,0663 %	0,0763 %	0,0863 %	0,0863 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	73,99 %	72,92 %	71,83 %	70,95 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
			Persentase pengurangan sampah	%	23,94 %	25,88 %	26,94 %	27,89 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %

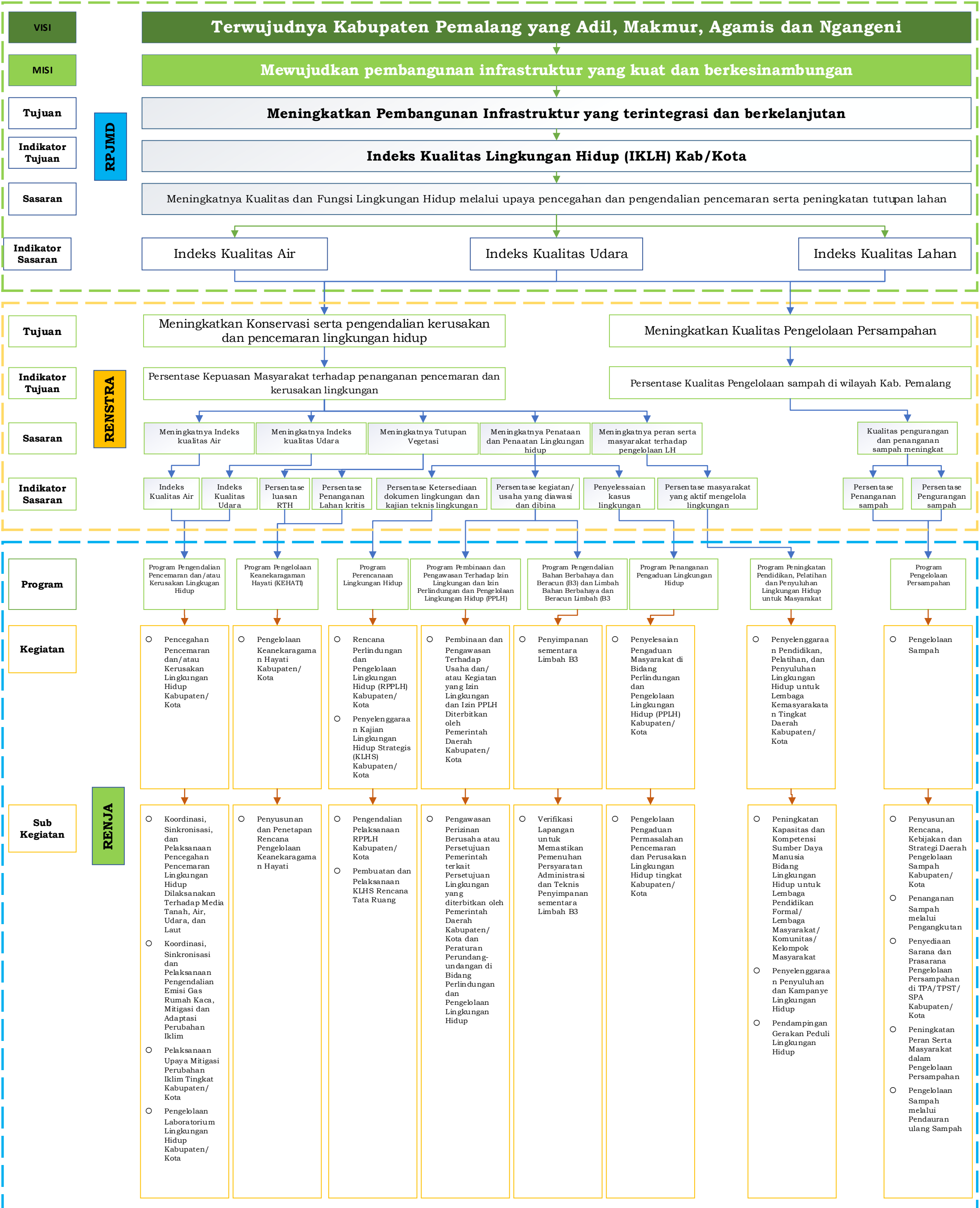
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	72,92	80,15	80,38	80,61	80,84	81,07	81,07
			Nilai SAKIP	Nilai	56,01	58,01	60,01	64,00	64,01	66,01	66,01

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG


WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk.I

NIP. 19700131 199303 2 003

RENCANA POHON KINERJA (CASCADING) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																					
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11		
						Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 pengaduan	Menindaklanjuti aduan masyarakat tentang lingkungan hidup	5.025.000	Kabid PKL															
Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase Penanganan sampah	-	-	-	70%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7.883.532.000	DLH															
	Persentase pengurangan sampah	-	-	-	30%	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola secara 3R	100%		7.883.532.000	Kabid PKL															
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 kelompok	Pelatihan pengelolaan sampah dalam kegiatan musrenbang	460.000.000																
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 unit	Pengadaan kendaraan roda 3 pengangkut sampah, tanah urug TPA, mesin pencacah dan pemilah sampah, mesin press sampah dan mesin conveyor	930.000.000																
						Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Penyusunan dokumen data bank sampah dan lapak di kab. Pemalang	420.000.000																
						Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	8500 ton	Pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	6.073.532.000		Ka Unit Kebersihan dan Persampahan														





KABUPATEN PEMALANG

Pemalang, 13 Maret 2026

Nomor : 000.8.6.2/65/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rekomendasi atas LKjIP DLH
Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di –

Pemalang

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk selanjutnya, kami sampaikan rekomendasi atas penyempurnaan dokumen LKjIP DLH Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kata Pengantar untuk tanggal tanda tangan disesuaikan dengan tanggal 31 Desember 2025;
2. Tabel 1.2 bahwa tabel jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan kelas bukan berdasarkan golongan;
3. Tabel 2.5 ditulis nama sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan, indikator dan target per sasaran;
4. Tabel 3.5 untuk nilai IKM dan SAKIP disebutkan pembandingan dengan OPD lain (nama OPD nya), dan untuk indikator IKM dijelaskan pelayanan publik (PEKPP dan Ombudsman);
5. Tabel 3.1.7. dihitung ulang untuk efisiensi;
6. Tabel 3.12 dijelaskan analisa mengapa program dapat dikatakan menunjang sasaran tersebut;

Hasil perbaikan atas dokumen LKjIP sebagaimana tersebut di atas disertai dengan tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Pemalang dikirimkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang dalam bentuk *softcopy* format PDF dan telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Srikandi (<http://srikandi.arsip.go.id>) serta tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang c.q. Kepala Bagian Organisasi, dalam format word dikirimkan paling lambat Hari Senin, 16 Maret 2025 melalui link <https://bit.ly/4bnrZ7l>

Demikian hasil rekomendasi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



BAGUS SUTOPO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197907111997111001

- Tembusan:
- 1. Bupati Pemalang;
 - 2. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339
Laman www.inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 28 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/0360/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2024

Yth. Bapak Bupati Pemalang

di-

PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- h) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 100.3.3.2/699/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- i) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor: 700.1.2.7/0249/2025 tanggal 10 Maret 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai

seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dilakukan oleh tim evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

a) Tujuan Umum

Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah

b) Tujuan Khusus :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam dan profesional *judgement* evaluator. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Ceklis pengumpulan data dan informasi
- b) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana
- c) Observasi
- d) Studi dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab	:	Zaini Dwi Hadonko, SE
2.	Ketua Tim	:	Adji Nuswantoro, S. Hut.
3.	Anggota	:	Gunawan Wibisono, S.Si.,M.Si.
4.	Anggota	:	Sri Pangastuti, SE.

1.7. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

a) Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

b) Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dan di Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dan di Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dan di Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi ke 6 Bupati yaitu misi "*Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan*", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 12 (duabelas) indikator.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat capaian seluruh indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Kualitas Udara	89,53	92,83	103,69
2.	Indek Kualitas Air	47,59	48,33	101,55
3.	Presentase ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Tehnis Lingkungan	100	66,67	66,67
4.	Presentase Kegiatan Usaha /kegiatan yang diawasi/dibina	100	100	100
5.	Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100

6.	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	60	60	100
7.	Persentase Luasan RTH Publik	43,087	43,083	99,99
8.	Persentase Penanganan Lahan Kritis	0,0663	0,000154	0,23
9.	Persentase Penanganan Sampah	70,95	50,46	71,12
10.	Persentase Pengurangan Sampah	27,89	25	89,64
11.	Indek Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh	80,61	80,42	99,76
12.	Nilai SAKIP	64	64,44	100,69
Rata-rata				86,11

Berdasarkan pencapaian atas indikator kinerja tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar **86,11 %** termasuk dalam kategori **Tinggi**. Pencapaian tertinggi ada pada nilai Indeks Kualitas Udara yaitu mencapai 103,69 % sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Masih Perlu Tindak Lanjut
1	Mengunggah dan mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Laporan Kinerja pada website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan ESR Kemenpan RI;	Telah dimanfaatkan untuk memengungga dan mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Laporan Kinerja	Telah sesuai
2	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun	Telah disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Telah sesuai

	berjalan;		
3	Menyelaraskan target kinerja pada dokumen perencanaan yang telah dibuat.	Sudah diselaraskan	Telah sesuai
4	Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kabupaten Pemalang atas evaluasi yang telah dilakukan, serta membuat laporan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.	Sudah ditindaklanjuti	Telah sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 mendapatkan Nilai **69,19** kategori **BAIK** dengan Predikat **"B"**. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

	Komponen	Bobot	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	30	4,80	7,04	11,25	23,09
2.	Pengukuran Kinerja	30	4,00	6,30	10,50	20,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,00	5,03	10,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,17	4,50	7,50	15,17
Total Nilai		100	14,07	20,84	34,28	69,19

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,75 yaitu dari **64,44** menjadi **69,19** pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1. Hasil Evaluasi

a) Penilaian Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

1) Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan perencanaan kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Beberapa hal yang harus terus dikuatkan yaitu :

- Tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan sasaran telah dituangkan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup
- Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2024 telah memuat sasaran, indikator kinerja dan target
- Perencanaan anggaran telah di masukan dalam RKADPA, akan tetapi perlu dikuatkan dengan membuat Manajemen Resiko sampai pada sub kegiatan.
- Pohon Kinerja telah disusun optimal untuk terus disempurnakan.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11(sebelas) kriteria yang dipersyaratkan. Website://dlh.pematangkab.go.id telah menjadi jembatan yang baik dalam memberikan informasi dan data tentang aktivitas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup baik itu mengenai capaian kinerja, cascading yang telah disusun, indek kinerja utama, LKJiP, Perjanjian Kinerja, rencana Aksi sekaligus Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang dipersyaratkan, akan tetapi perlu terus diperbaiki dari isi dan substansi perlu lebih maksimal menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

3) Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang telah berusaha optimal atas hasil yang berkesinambungan akan tetapi perlu terus ditingkatkan kinerjanya yaitu beberapa capaian kinerja belum memenuhi hasil seperti yang direncanakan yaitu pada Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian Tehnis Lingkungan, Prosentase Kegiatan Usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina dan Penyelesaian Kasus *Lingkungan*.

Untuk itu Perencanaan Kinerja untuk lebih dimaksimalkan pemanfaatannya untuk menuju hasil yang terus meningkat.

b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian Komponen Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan yaitu telah berusaha disediakan dengan tersedianya dokumen atau media yang memuat hasil pengukuran kinerja serta pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan kinerja.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran Kinerja telah mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Beberapa capaian kinerja yang perlu mendapatkan perhatian dan upaya peningkatan terus menerus yaitu Presentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan, Presentase Luasan RTH Publik, Presentase Penanganan Lahan Kritis, Presentase Penanganan Sampah, Presentase Pengurangan Sampah, dan Indek Kepuasan Masyarakat.

3) Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan hasil evaluasi pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas anggaran dalam mencapai kinerja dengan terus mengoptimalkan pengukuran pencapaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi.

c) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian komponen pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja sebanyak 6 (tiga) kriteria dari 6 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala telah disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan di website <https://dlh.pematangkab.go.id> dan aplikasi esr-menpan.

Laporan kinerja telah disusun secara berkualitas dan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi perlu terus ditingkatkan baik capainnya maupun kinerjanya.

2). Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang dipersyaratkan.

Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, juga menjelaskan seluruh capaian dan target kinerja dari indikator kinerja (sasaran, IKU, program kegiatan dan sub kegiatan).

3). Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub Komponen Pelaporan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Pelaporan Kinerja terus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Terutama untuk kinerja yang belum tercapai yaitu Persentase Penanganan Lahan Kritis, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum memenuhi target.

d). Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan yaitu terdapat Peraturan Bupati Nomor

37 tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Laporan dari Hasil Evaluasi Sakip nomor 700/164/EVS/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

2). Sub Komponen Kualitas/Mutu Sub Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Evaluator telah mendapatkan pelatihan evaluasi SAKIP dan evaluator telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan kinerja. Pelaksanaan evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

3). Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang dipersyaratkan. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi akuntabilitas sudah dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), tindak lanjut LHE SAKIP dan laporan AKIP internal yang digunakan untuk peningkatan kinerja.

2.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;

- b. Menyusun *crosscutting* secara baik sampai pada program dan kegiatan;
- c. Menyusun lebih optimal dalam penyusunan manajemen risiko sampai dengan sub-kegiatan

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai **69,19** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,09
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,80
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,13
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,17
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,19

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **69,19** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya termasuk dalam kategori interpretasi "**BAIK**" dengan predikat "**B**" (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang Lebih Baik.

Atas hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, secara umum dalam rangka peningkatan nilai AKIP di waktu yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE);

- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang dan Bappeda Kabupaten Pemalang dalam penyusunan LKjIP dan dokumen perencanaan di tahun yang akan datang;
- c. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Pemalang, April 2025
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST.
Pembina Tk I
NIP. 19771006 200501 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kab. Pemalang.

- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang dan Bappeda Kabupaten Pemalang dalam penyusunan LKjIP dan dokumen perencanaan di tahun yang akan datang;
- c. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Pemalang, April 2025
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST.
Pembina Tk I
NIP. 19771006 200501 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kab. Pemalang.



KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN TINDAK LANJUT

ATAS LHE AKIP DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PEMALANG

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sesuai dengan kewenangannya, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut disusun secara periodik setiap tahun sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementase SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanatkan dalam perencanaan strategis.

Penyusunan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700.1.2.1/0360/2025 tanggal 28 April 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- 1. Menyusun tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- 2. Meningkatkan implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

C. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, DLH Kab. Pemalang memperoleh nilai **69,19** (kategori Baik) dengan Predikat **B**. Rincian hasil penilaian terhadap setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Hasil Penilaian Setiap Komponen Evaluasi AKIP Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	7,04	11,25	23,09
Pengukuran Kinerja	30	4,00	6,30	10,50	20,80
Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,00	5,03	10,13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inetrnal	25	3,17	4,50	7,50	15,17
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	14,07	20,84	34,28	69,19

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DLH Kab. Pemalang, 2025.

D. REKOMENDASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

- 1. Mengoptimalkan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
- 2. Menyusun crosscutting secara baik sampai pada program dan

- kegiatan;
3. menyusun lebih optimal dalam penyusunan manajemen risiko sampai dengan sub kegiatan.

E. TINDAK LANJUT LHE AKIP

Untuk mendorong adanya peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melaksanakan hasil rekomendasi Inspektorat Kabupaten Pemalang dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kab. Pemalang dan Bappeda Kabupaten Pemalang dalam penyusunan LKJIP dan dokumen perencanaan di tahun yang akan datang;
3. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.

F. PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Atas LHE AKIP Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang disusun untuk menindaklanjuti laporan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang.

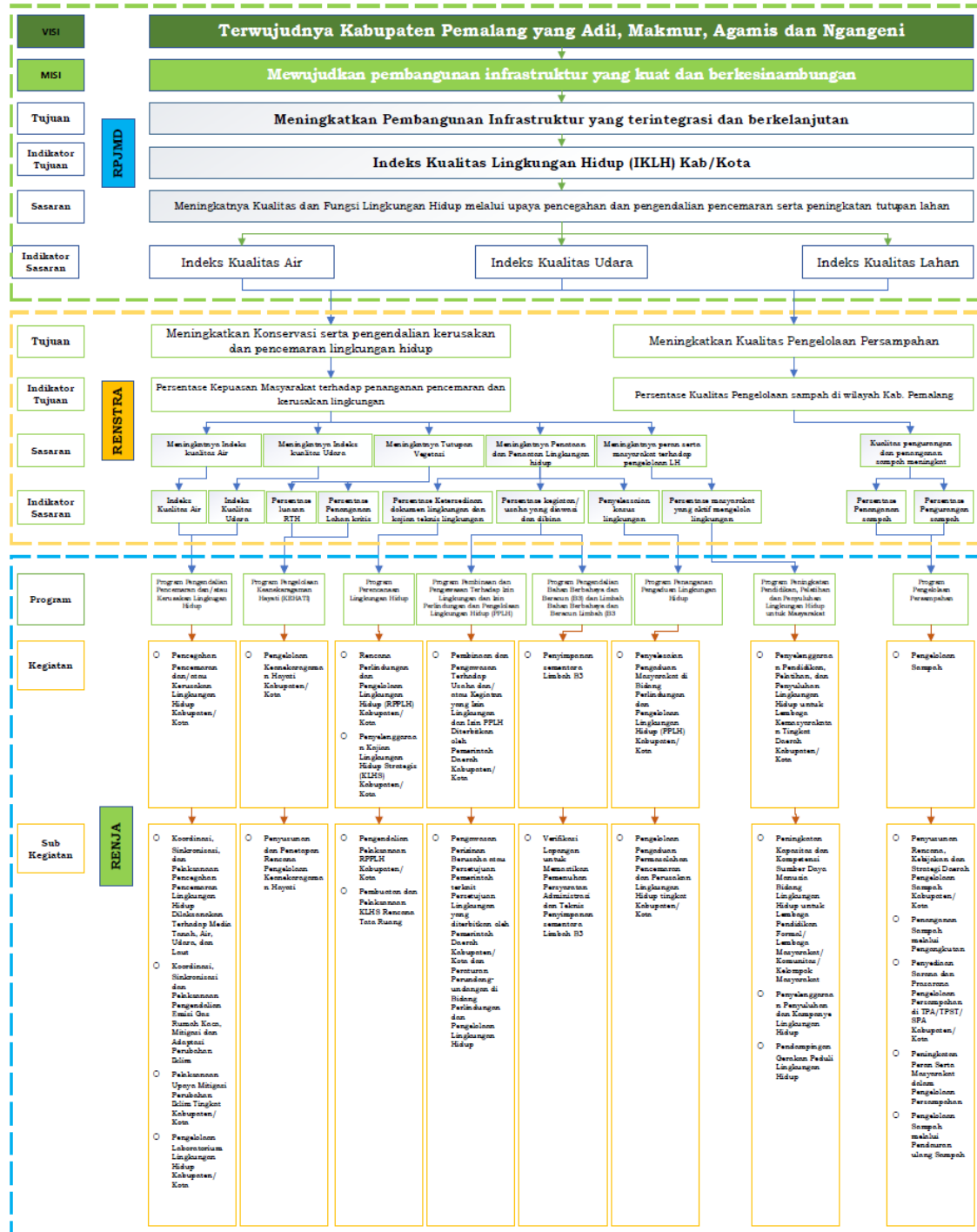
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



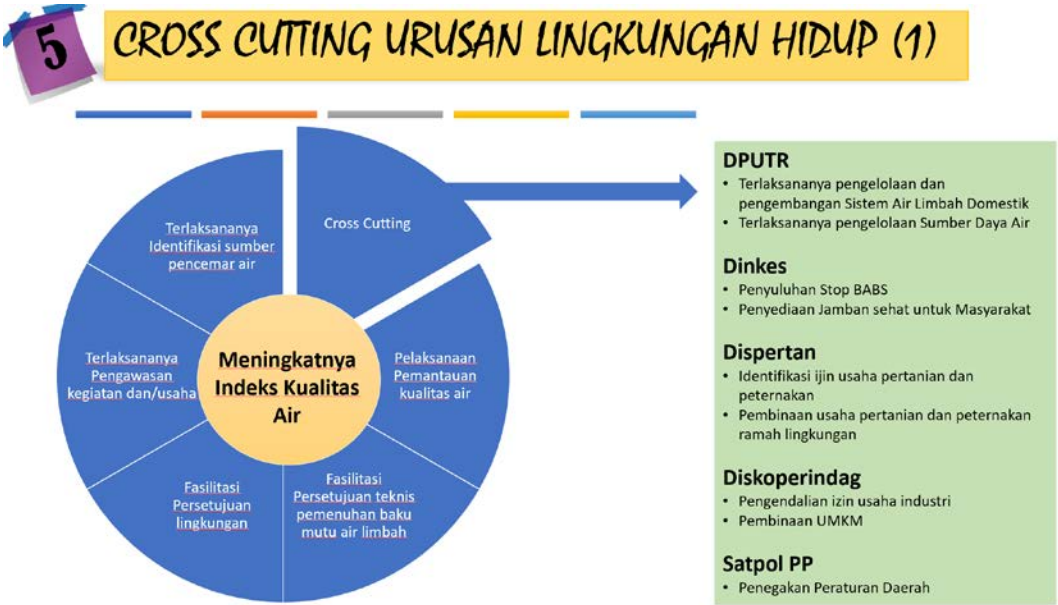
LAMPIRAN

1. Mengoptimalkan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021

RENCANA POHON KINERJA (CASCADING) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

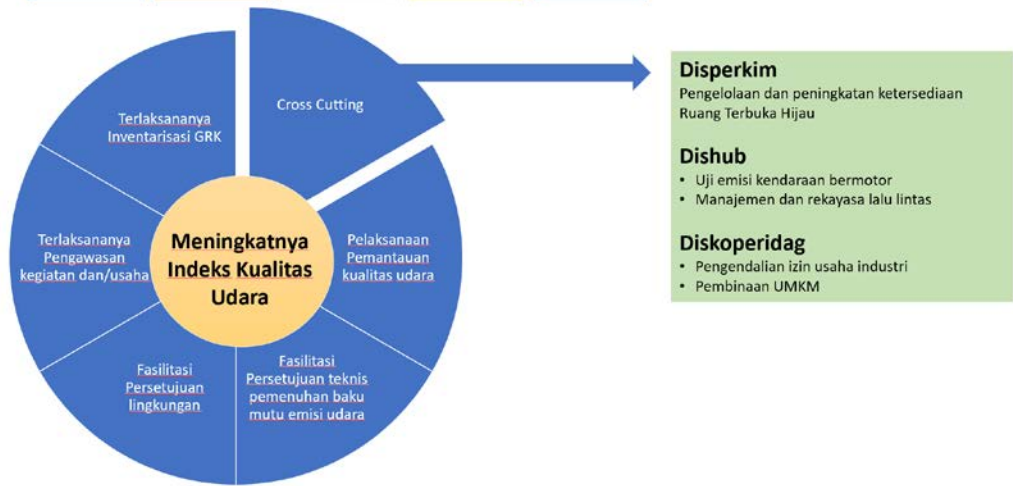


2. Menyusun crosscutting secara baik sampai pada program dan kegiatan



5

CROSS CUTTING URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (2)



3. Menyusun lebih optimal dalam penyusunan manajemen risiko sampai dengan sub kegiatan

Form 10. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah											
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pematang											
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup											
Tahun Penilaian : 2026											
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025-2029											
Tujuan Strategis Pemda : Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman											
Sasaran Strategis Pemda : Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan											
Uraian Pemerintah : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Pemilik	Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup										
	1 Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										
	1 Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Menghimpun RPPLH Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak diperolehnya data-data pendukung penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	ROO.26.11.17.1	Kepala bidang Penataan, Petautan dan Peningkatan Kapasitas	Tidak adanya data di OPD terkait	Eksternal dan Internal	C	Kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup kurang maksimal	DLH, Masyarakat
	2 Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan										
	2 Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	KLHS tidak dapat divalidasi	ROO.26.11.17.2	Kepala bidang Penataan, Petautan dan Peningkatan Kapasitas	Keterlambatan proses pengajuan validasi	Internal	C	Perda RTRW tidak dapat ditetapkan	DLH, DPRD, Masyarakat
2	Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
	1 Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
	1 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan	Titik lokasi pemantauan/uji kualitas air dan udara belum terbagi menurut kawasan peruntukannya	ROO.26.11.17.3	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	Belum melakukan survey pendahuluan dalam rangka penentuan titik lokasi pemantauan/uji kualitas air dan udara sesuai kawasan peruntukannya	Internal	C	Jumlah titik lokasi pemantauan/uji kualitas air dan udara pada kawasan tertentu lebih banyak daripada kawasan lainnya	DLH, pelaku usaha, masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Pematang
	2 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Data Emisi Gas Rumah Kaca tidak akurat	ROO.26.11.17.4	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	Tidak ada data lengkap untuk inventarisasi gas rumah kaca	Eksternal dan Internal	C	Penetapan target penurunan emisi yang tidak realistis (terlalu tinggi)	DLH, Masyarakat
	3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Pelaksanaan	Mitigasi terhadap perubahan iklim tidak maksimal	ROO.26.11.17.5	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	Informasi terhadap perubahan iklim tidak ada	Eksternal dan Internal	C	Masyarakat merasakan dampak terhadap perubahan iklim	DLH, Masyarakat
	4 Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pelaksanaan	Sebagian besar personel labling merupakan tenaga Non ASN yang memiliki peran cukup vital dalam operasional laboratorium.	ROO.26.11.17.6	Kepala Laboratorium Lingkungan	Tenaga Non ASN sewaktu-waktu dapat resign dan tidak memiliki jaminan bekerja secara permanen	Eksternal dan Internal	UC	Menurunnya kualitas dan kuantitas layanan.	DLH, Labling, dan masyarakat
			Pelaksanaan	Rotasi dan mutasi jabatan. Personel yang baru umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memahami dan menjalankan good laboratory practices (GLP), kecuali mereka yang memiliki pengalaman mengelola atau bekerja pada laboratorium serta latar belakang pendidikan yang sesuai.	ROO.26.11.17.7	Kepala Laboratorium Lingkungan	Di level internal laboratorium standar kompetensi telah ditetapkan. Namun di level pemerintah daerah standar kompetensi ASN yang ditugaskan di laboratorium seperti ini belum ada.	Eksternal	UC	Menurunnya kualitas dan kuantitas layanan.	DLH, Labling, dan masyarakat
			Pelaksanaan	Kehilangan alat uji laboratorium.	ROO.26.11.17.8	Kepala Laboratorium Lingkungan	Pencurian. Labling belum memiliki SDM yang bertugas untuk menjaga fasilitas laboratorium, serta tidak memiliki sarana keamanan yang memadai.	Eksternal dan Internal	C	Hilangnya aset, beban anggaran untuk mengganti alat yang hilang, dan layanan tidak optimal.	DLH, Labling, dan masyarakat
			Pelaksanaan	Kerusakan alat uji laboratorium.	ROO.26.11.17.9	Kepala Laboratorium Lingkungan	Alat uji laboratorium rentan terhadap kerusakan. Sementara perbaikan alat yang rusak tidak bisa segera diupayakan perbaikannya karena terkendala sistem penganggaran dan belum ada SSH tentang perbaikan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium (dilarai kalibrasi)	Internal	UC	Layanan tidak optimal.	DLH, Labling, dan masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab			C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
			Pelaksanaan	Kecelakaan kerja pada saat pengambilan contoh uji dan analisis laboratorium	ROO.26.11.17.10	Kepala Laboratorium Lingkungan	Lalai menjalankan SOP serta kondisi kendaraan pengambil contoh uji yang kurang layak.	Eksternal dan Internal	C	Kehilangan personel dan terganggunya layanan	Personel beserta keluarganya, DLH, Labling, dan masyarakat	
			Pelaksanaan	Akreditasi dan registrasi sebagai prasyarat utama penyelenggaraan layanan laboratorium lingkungan dicabut oleh lembaga yang berwenang.	ROO.26.11.17.11	Kepala Laboratorium Lingkungan	Labling gagal memenuhi kewajiban sebagai laboratorium pengujian yang terakreditasi dan teregistrasi baik karena kurangnya anggaran, personal yang tidak kompeten, maupun fraud.	Eksternal dan Internal	C	Labling tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan	DLH, Labling, dan masyarakat	
3	Program: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)											
	1 Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota											
	1 Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Pelaksanaan	Terjadinya penurunan keanekaragaman hayati	ROO.26.11.17.12	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	Keterbatasan kewenangan dan kurangnya intervensi terhadap pengelolaan kehati	Eksternal dan Internal	C	Penurunan kualitas ekosistem secara jangka panjang	DLH, Masyarakat	
	2 Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Penataan RTH tidak maksimal	ROO.26.11.17.13	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	Tidak tercapainya jumlah tanaman/pohon penghijauan yang ditata	Eksternal dan Internal	C	Kurangnya luasan RTH	Masyarakat	
4	Program: Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)											
	1 Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3											
	1 Sub Kegiatan : Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Pelaksanaan	Masih ada kegiatan/usaha yang belum memahami ketentuan pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3	ROO.26.11.17.14	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	Pelaku usaha belum memahami dan mengetahui ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3	Eksternal	C	Pengelolaan Limbah B3 dari pelaku usaha/kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	DLH, pelaku usaha/kegiatan	
5	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)											
	1 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLIH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota											
	1 Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pelaksanaan	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal	ROO.26.11.17.15	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Adanya penolakan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan	Eksternal	UC	Potensi terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerawanan sosial	DLH, Masyarakat	
6	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat											
	1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											
	1 Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Masih banyak sekolah yang belum melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	ROO.26.11.17.16	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Anggaran sekolah terbatas dan tidak ada program Adiwiyata	Eksternal	C	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sekolah Adiwiyata	DLH, Dindikbud, Sekolah	
	2 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Pelaksanaan	Tidak ada indikator keberhasilan kampanye lingkungan hidup	ROO.26.11.17.17	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Perencanaan hanya fokus pada kegiatan (output), bukan pada perubahan perilaku (outcome)	Internal	C	Sakit mental perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku peserta kampanye	DLH, Masyarakat	